

ANALISIS PROBLEMATIKA PTKIN DI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

¹Trysha Yulindaputri, ²Sutrisno

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email correspondence: 22204011019@student.uin-suka.ac.id

Article History:

Received: 2022-12-30, Accepted: 2023-08-15, Published: 2023-09-08

Abstract

In order to prepare students to face rapid technological advances, changes in the world of work, culture and society, students' skills must be better prepared to face the demands of the times. Merdeka Belajar Kampus Merdeka aims to answer this need. Kampus Merdeka is a way of learning for higher education that is flexible, independent and creates a learning culture that is innovative, fluid and focused on student needs. The purpose of writing this article is to discuss the readiness of PTKIN Indonesia's Human Resources in the implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka and to find out the problems and challenges faced by PTKIN Indonesia in implementing Merdeka Belajar Kampus Merdeka. This research uses a library research approach with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the Merdeka Belajar Kampus Merdeka requires guidelines or recommendations from and within the PTKIN leadership in the implementation process. Some PTKINs are still unsure and are not ready to apply the principles of Merdeka Belajar Kampus Merdeka at this time. The problem they face is a change in mindset that takes time. The problems and challenges faced by PTKIN in carrying out Merdeka Belajar Kampus Merdeka include cooperation mechanisms between PTKIN and study programs with foreigners, changing the paradigm in PTN-BH to compete at the international level, and apprenticeship mechanisms outside the study program.

Keywords: Problematics, PTKIN, Freedom to Learn, Independent Campus

Abstrak

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, perubahan dalam dunia kerja, budaya dan sosial, kemampuan mahasiswa harus lebih disiapkan untuk dapat memenuhi tuntutan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Kampus Merdeka merupakan bentuk pembelajaran perguruan tinggi yang mandiri dan fleksibel, menciptakan budaya belajar yang inovatif, mengalir bebas, dan berbasis kebutuhan mahasiswa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan SDM PTKIN di Indonesia dalam menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan untuk mengetahui problematika dan tantangan PTKIN di Indonesia dalam menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi pustaka (library research) dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam proses pelaksanaannya memerlukan pedoman atau rekomendasi dari pimpinan PTKIN dan antar PTKIN. Beberapa PTKIN masih ragu-ragu dan belum memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini, persoalan yang dihadapi adalah perubahan pola pikir yang memakan waktu cukup lama. Problematika dan tantangan yang dihadapi oleh PTKIN dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya, yaitu mekanisme kolaborasi antara PTKIN dan program studi dengan pihak luar, perubahan paradigma pada PTN-BH dalam bersaing skala internasional dan mekanisme magang di luar program studi.

Kata Kunci: Problematika, PTKIN, Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan modern yang berkembang pesat, menimbulkan permasalahan serius bagi setiap kelompok masyarakat. Globalisasi era 4.0 dan 5.0 memiliki dampak yang telah dialami di segala bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan (Hidayat, 2019). Tingkatan ini ditandai dengan kelemahan manusia dalam teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Pengembangan konsep ini didasarkan pada perubahan teknis yang dibutuhkan di era Industri 4.0 sebagai cerminan visi pendidikan ke depan untuk memenuhi kebutuhan Industri 4.0. Metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa digunakan untuk mempelajari hal-hal baru di era 4.0 (Sabriadi & Nurul Wakia, 2021).

Di era Industri 4.0, pengembangan kurikulum adalah satu-satunya proses terpenting untuk memajukan pembelajaran mahasiswa. Ini merupakan langkah krusial dalam menghasilkan karya sastra baru, seperti sastra data, sastra teknologi, dan sastra humaniora yang berwawasan mulia. Kebijakan hak belajar untuk mahasiswa di luar program akademik adalah cara utama untuk menyelesaikan tugas ini. Dikenal sebagai Kampus Merdeka, kebijakan tersebut memiliki misi untuk mengembangkan proses pendidikan yang mandiri dan fleksibel di perguruan tinggi sekaligus mengembangkan praktik pendidikan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Hal ini mendorong mahasiswa untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan yang akan membantu mereka menemukan pekerjaan dan memberdayakan mereka untuk memutuskan apa yang ingin diambil di perkuliahan. Selain itu, kebijakan tersebut berupaya guna memperkuat hubungan dan akses di sektor bisnis dan industri, mempersiapkan mahasiswa dengan lebih baik untuk kehidupan kerja sejak awal. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengikuti tugas mata kuliah (SKS) di luar program studinya, baik di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi, dan/atau di non-perguruan tinggi agar mereka memperoleh berbagai ilmu yang berguna di dunia kerja (Sabriadi & Nurul Wakia, 2021).

Untuk dapat memitigasi pengaruh teknologi modern, serta perubahan dunia kerja, keyakinan agama, dan adat istiadat sosial, kapasitas mahasiswa harus ditingkatkan. PTKIN harus mampu mengembangkan dan menerapkan proses pendidikan yang inovatif dengan cara yang memungkinkan mahasiswa untuk berhasil menyelesaikan tujuan pembelajaran mereka, mungkin dalam bidang pemahaman konseptual, aplikasi praktis, dan pemahaman konten. Kebijakan Belajar Kampus Merdeka adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan ini. Bagi mahasiswanya, Kampus Merdeka yang mandiri dan adaptif menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tahan lama dan menantang. Salah satu hasil paling signifikan dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah pengalaman belajar di kampus (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).

Ada kutipan dari Nadiem Anwar Makarim, terkait kemerdekaan belajar. Mendikbud Ristek RI menyatakan, “Kebebasan dan otonomi, kemandirian dari birokrasi, membebaskan dosen dari birokrasi yang berbelit dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang favoritnya.” Isu ini kemudian melahirkan kebijakan yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan lulusan, baik kemampuan berinteraksi dengan orang lain maupun keahlian dalam pekerjaan tertentu. Hal tersebut ditujukan dalam persiapan para alumni menjadi pelopor masa depan negara dengan insan-insan yang luar biasa dan dapat memenuhi kebutuhan zaman dengan baik. Melalui program pembelajaran berbasis pengalaman yang fleksibel, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilannya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Baro’ah, 2020). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah jawaban terhadap bertambahnya persaingan sumber daya manusia di seluruh dunia pada abad ke-21. Ada tiga kekuatan utama saat ini, yaitu kapasitas untuk berpikir, bertindak, dan eksis dalam masyarakat. Pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir kritis adalah contoh keterampilan berpikir. Komunikasi, kerja tim, literasi digital, dan literasi teknologi adalah contoh keterampilan praktis. Perencanaan, kemandirian, pemahaman global, dan keterampilan interpersonal diperlukan

untuk hidup di lingkungan saat ini. Kemampuan ini harus diajarkan di sekolah pada abad ke-21 karena inovator dan pembuat perubahan yang cepat sangat penting di dunia modern. Sehubungan dengan globalisasi, pemerintah Republik Indonesia sangat berkepentingan untuk menyediakan akses cepat ke layanan dan infrastruktur yang sesuai (Jesika Dwi Putriani & Hudaidah, 2021).

Solusi yang dapat dilakukan PTKI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi salah satunya adalah kemandirian Kampus Merdeka untuk mengkaji kebijakan yang sesuai dengan peluang, permasalahan dan isu yang dihadapi perguruan tinggi, termasuk PTKI. Menjadi lebih mandiri, inventif, kreatif, fleksibel, penting untuk hubungan manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan industri dan dunia kerja diarahkan olehnya. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama yang terkait dengan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi, yaitu: memfasilitasi pembukaan program studi baru, reformasi sistem kualifikasi pendidikan tinggi, membantu perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH, dan hak belajar tiga semester di luar prodi (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2020).

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membutuhkan dukungan penuh oleh pemerintah yang mencakup semua individu yang terlibat dalam menerapkan dan mengelola PTKI. Setiap departemen yang terlibat dalam administrasi PTKI dapat melakukan tugasnya di bawah pemerintah. Organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan ini, mulai dari unsur Kemenag Pusat, PTKI, mahasiswa dan mitra kerja sama, memiliki peran, tanggung jawab dan tugas yang bergantung pada dukungan (Prastowo, Suyadi, & Sutrisno, 2021).

Saat ini program MBKM telah dilaksanakan oleh beberapa PTKI. Namun untuk menerapkan kebijakan ini, PTKI harus bersiap untuk menjalankan program yang sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi dan sumber daya yang ada. Perguruan tinggi harus menentukan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman program studi, termasuk dukungan untuk pembelajaran lintas jurusan dan alokasi pendanaan, serta bagaimana agar kualitas lulusan tidak menurun setelah menjalankan program ini (Supriyoko, Rochmiyati, Irfan, & Ghazali, 2022).

Tantangan-tantangan yang dihadapi PTKIN ke depan, berdasarkan realita di lapangan seperti kurangnya perhatian dari Kemenag terkait tindak lanjut pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, minimnya fasilitas dari Kemenag, minimnya pendampingan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, minimnya anggaran dari Kemenag, bahkan hampir semua SDM di Kemenag kurang memahami mengenai perguruan tinggi. Seharusnya, PTKIN mampu membuat pedoman sendiri mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terlalu banyak yang tidak paham latar belakang atau filosofi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kurang memahami SOP implementasi MBKM. Selama ini PTKIN tidak menindaklanjuti dan tidak banyak menekuni, dikarenakan sebagian besar memang belum memiliki kesiapan.

Masalah lain pada PTKIN adalah masih banyak metode pembelajaran yang mengulang pelajaran hingga hafal, khususnya pada prodi studi Islam. Kurikulum ini masih banyak tersedia di PTKIN yang mungkin merupakan kelanjutan dari kurikulum di pesantren dan beberapa madrasah. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu bersaing dalam kehidupan saat ini dan khususnya di masa mendatang. Padahal, kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan membutuhkan pengembangan produktivitas dan inovasi yang tinggi untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan selanjutnya adalah PTKIN tidak menghasilkan pengetahuan ilmiah (sains) eksperimental. Hal ini terjadi karena PTKIN masih mengembangkan beberapa ilmu *natural sciences*, humaniora, ilmu alam dan ilmu terapan. Sumber daya PTKIN masih sangat terbatas, begitu pula dengan jumlah peneliti dan pengajar di bidang keilmuan terkait. Belum ada laboratorium dengan peralatan yang lengkap dan mutakhir, serta bahan penelitian.

Demikian pula dengan anggaran yang masih terbatas untuk penelitian dan pengembangan, *experiment*, uji coba dan penerbitan (Prastowo et al., 2021).

Pada kenyataannya, regulasi MBKM belum diterapkan secara individual di PTKIN Indonesia. Program ini sangat baik karena mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengeksplorasi digitalisasi, namun dikhawatirkan fasilitas dan peralatan yang salah akan menimbulkan banyak celah dan menimbulkan diskriminasi. Kemudian, kurangnya kesadaran dan pembinaan dalam aturan MBKM menyebabkan sebagian mahasiswa tidak memahami MBKM yang dapat menyebabkan kesulitan bagi mahasiswa untuk mengubah struktur organisasinya untuk mengimplementasikan MBKM (Faisal, ZA, Siswanto, Hayati, & Darajat, 2021). Selain itu, tidak ada akomodasi khusus bagi mahasiswa tanpa masalah ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru.

Kebijakan MBKM terikat erat dengan tuntutan pasar dan kebutuhan dunia usaha, tetapi tidak pada pengembangan akhlak siswa, ketaatan pada prinsip-prinsip Pancasila, atau cinta tanah air. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa PTKIN hanya menciptakan pekerja dan bukan intelektual. Seorang mahasiswa tidak hanya harus memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan (Puspitasari, 2023). Pertanyaan utamanya adalah apakah MBKM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum. Diharapkan selain memberikan gagasan, teori dan konsep dari MBKM juga akan memberikan mahasiswa dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam bisnis dan industri.

Penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan di antaranya, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan SDM PTKIN di Indonesia dalam menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, 2) Bagaimana problematika dan tantangan PTKIN di Indonesia dalam menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka?. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum merdeka oleh PTKIN mengalami kesulitan, maka dari itu peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Problematika PTKIN di Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk menunjukkan kajian ilmiah yang dapat tercipta di masa depan, data penelitian dikumpulkan melalui analisis buku atau bahan yang ditawarkan dalam pembahasan. Data-data tersebut kemudian dilengkapi dengan analisis deskriptif, yang dilakukan secara sistematis dan obyektif (Zed, 2017). Pokok pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan Problematika PTKIN Indonesia dalam melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengumpulan data dalam artikel ini diawali dengan pengumpulan berbagai bahan yang sesuai, baik berupa teks maupun *soft copy*, misalnya buku teks, buku ilmiah, *e-book* dan lain-lain. Kedua jenis literatur ini adalah sumber utama untuk menjelaskan berbagai hal dalam artikel ini. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan data terkait problematika PTKIN Indonesia dalam melaksanakan Kebijakan MBKM.

PEMBAHASAN

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka belajar adalah kebebasan yang dimiliki setiap peserta didik untuk menentukan arah proses belajar dan mengajar. Hal ini terlepas dari faktor-faktor yang telah terjadi seperti fokus pada pekerjaan dosen dan mahasiswa yang begitu banyak sehingga melalaikan pekerjaan utamanya. Merdeka Belajar merupakan sistem politik baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, kebebasan berpikir yang utama,

menurut Nadiem, harus dilakukan oleh dosen sebelum mereka mengajar mahasiswanya. Nadiem mengatakan, dengan kemampuan dosen di semua tingkatan, tanpa sistem menerjemahkan bahasa induk ke dalam kurikulum berlaku, maka pembelajaran tidak akan terjadi (Hiskia U & Willius Kogoya, 2022).

Program Merdeka Belajar adalah program dengan pembelajaran intrakurikuler yang berbeda dimana isinya akan lebih baik sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk menggali ide dan memperkuat keterampilan mereka. Dosen memiliki keleluasaan untuk memilih bahan ajar yang beragam sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Proyek-proyek yang dirancang untuk memperkuat pencapaian profil mahasiswa Pancasila telah dikembangkan berdasarkan topik-topik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat dengan isi mata pelajaran (Putra dkk, 2022).

Program Merdeka Belajar merupakan program yang dapat dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan mulai tahun ajaran 2022–2023. Program ini melanjutkan busur pengembangan program sebelumnya (kurtilas). Diperlukan landasan yang kokoh untuk inovasi kurikulum baru, dan pemikiran yang matang sangat diperlukan. Jika kurikulum tidak dikembangkan sesuai dengan pondasi yang ketat, mungkin akan mematikan bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Akibatnya, ini kemungkinan ada hubungannya dengan proses konstruksi manusia yang lambat. Filsafat, hubungan sosial dan agama, teknologi dan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan dasar pengembangan kurikulum. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan tujuan pendidikan nasional dengan tetap menekankan pengembangan bakat dan keterampilan mahasiswa dalam kajian pengetahuan kontekstual dan dasar (Ariga, 2022).

Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan pengalaman belajar yang menarik dan instruktif. Praktik pedagogis saat ini juga membekali dosen untuk merencanakan dan melaksanakan proses pengajaran. Dosen juga menawarkan amanah sebagai alat untuk melakukan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyimpulkan evaluasi tersebut (Sutrisno dkk, 2022). Pendekatan pendidikan yang dinamis, menciptakan perubahan, dan sehat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa di zaman modern. Selain itu, dosen harus berperan sebagai penyedia dalam mengembangkan mahasiswa berkarakter yang kritis, kreatif, dan inovatif, memiliki komunikasi yang baik serta kerja tim serta pengembangan karakter. Dosen harus mengusulkan beberapa metode pengajaran yang efektif, khususnya untuk kurikulum Merdeka Belajar, daripada hanya memanfaatkan kebutuhan mahasiswa untuk mencari materi pembelajaran secara online, seperti *e-book*. Salah satu paradigma pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang dosen disebut *blended learning* (Manalu dkk, 2022).

Di masa depan, sistem pendidikan juga akan berpindah dari dalam kelas ke luar kelas. Suasana belajar akan lebih baik karena siswa dapat lebih banyak berdiskusi dengan dosen, *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi mengembangkan karakter mahasiswa yang berjiwa mandiri. Ke depan hal ini akan meningkatkan kualitas sivitas akademika yang mampu dan dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain di masyarakat (Hasim, 2020).

Di bidang pendidikan, Kampus Merdeka merupakan cabang dari program Merdeka Belajar. Program ini menawarkan kebebasan mahasiswa selama tiga semester kepada mahasiswa yang mencari peluang belajar di luar kelas. Tak jauh dari itu, penegasan di atas merupakan pernyataan tentang peningkatan mutu pendidikan yang dikemukakan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Pertukaran pelajar, magang, bantuan pengajaran di satuan pendidikan, penelitian, kegiatan kemanusiaan, wirausaha, proyek mandiri, kuliah kerja nyata tematik adalah jenis-jenis kegiatan umum dari konsep Kampus Merdeka (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).

Selain itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah memberikan responnya terhadap Kebijakan Mendikbud tentang Kampus Merdeka. Hal ini ditujukan untuk memfasilitas dan memenuhi hak mahasiswa. Agar mahasiswa mampu menghadapi perubahan kehidupan secara mendasar (*the changing nature of life*), perubahan cara bekerja secara mendasar (*the changing nature of work*). Perubahan secara mendasar (*the changing nature of education*) juga dirasakan dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan tinggi. Kampus konvensional telah berevolusi menjadi *smart campus*, *cyber campus*, *digital campus*, kampus daring, dan kampus serba *online*. Semua aspek pelayanan kampus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, *stakeholder*, pengguna lulusan, masyarakat umum mengalami perubahan. Segala kegiatan yang berhubungan dengan kampus semuanya harus dilakukan secara daring atau *online* (Prastowo et al., 2021).

Kegiatan kampus dan pelayanan kepada mahasiswa dilakukan secara serba daring, sekaligus diprioritaskan untuk mendidik kembali mahasiswa dalam cara hidup yang cerdas (*smart*). Sebagaimana dinyatakan di atas, hal ini dipandang sebagai metode untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa sehingga pemahaman mereka tentang cerdas media sosial juga sekaligus cerdas cara hidup. Ini adalah satu-satunya cara paling efektif untuk melatih siswa sejak awal sehingga mereka lebih sadar akan kebutuhan masyarakat modern, di mana koneksi dan kompatibilitas dibutuhkan tidak hanya dengan bisnis dan pasar tenaga kerja tetapi juga dengan ekonomi secara keseluruhan, yang mana terus berkembang. Dari segi kurikulum, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang terdiri dari: UII, UIN, IAIN, dan STAIN bertugas untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai penguasaan materi pelajaran, baik dengan memaksimalkan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, atau dengan membuatnya relevan dengan kehidupan sehari-hari (Prastowo et al., 2021).

Kebijakan utama pemerintah terkait dengan Kampus Merdeka Belajar sebagai terobosan terbaru, yaitu pembukaan program studi baru sesuai dengan kebijakan saat ini (M Yusuf & W Afriansyah, 2021):

1. Pembukaan Program Studi Baru

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru yang sarat dengan tuntutan kebutuhan daerah, industri dan dunia kerja apabila perguruan tinggi baik PTN maupun PTS memfasilitasi pengembangan program studi dengan tujuan inisiatif ini adalah untuk mengurangi produksi program akademik yang tidak terkait langsung dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Program studi sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 ayat 2 akan tetap mendapatkan akreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional.

2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Program akreditasi adalah satu-satunya yang berfungsi sebagai referensi untuk program akademik dan perguruan tinggi. Adanya kualifikasi ini memaksa perguruan tinggi dan program studi untuk berpartisipasi dalam pengembangan karakternya secara berkesinambungan dan sistematis, khususnya dalam tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Hukum Indonesia mengatur proses penerimaan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan menyiapkan ruang lingkup sertifikasi dan kajian pendidikan tinggi untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan mutu pendidikan tinggi. Namun, dalam pendidikan tinggi kontemporer, secara umum diterima bahwa merupakan beban berat dengan memberikan kewenangan untuk memperpanjang akreditasi lima tahun sekali, dan menggunakan semua dana yang tersedia untuk asosiasi pendidikan tinggi. Sumber daya yang digunakan untuk membuat dokumen dan korespondensi yang kurang produktif pada saat ini berubah menjadi kontraproduktif.

Mendikbud telah membuat elemen kunci dari model kualifikasi saat ini, di mana program studi yang baru dikembangkan akan secara otomatis mendapat nilai C sampai PT atau program studi tersebut meminta evaluasi lanjut. Prodi baru akan terus mendapatkan nilai C dari BAN-PT tanpa harus melalui verifikasi Kementerian. Menurut Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi prodi dan perguruan tinggi, persetujuan ini sudah berlangsung sejak awal keberadaan program tersebut.

Berdasarkan keputusan Menteri bahwa perguruan tinggi dan program studi baru yang meraih akreditasi “C”, maka diizinkan mengajukan ulang akreditasi, jika perguruan tinggi atau program studi tersebut gagal dalam proses kualifikasi perubahan menjadi baik “B”, maka harus menunggu selama 2 tahun pasca keluarnya keputusan. Dipercayai bahwa, kekhawatiran selama 2 tahun dapat menimbulkan masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru. Menurut penulis, ada hal lain dari kebijakan Mendikbud yang cukup menggembirakan, yaitu perguruan tinggi dan program studi secara otomatis meraih nilai A apabila telah mendapatkan dukungan baik dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian. Lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah di antaranya, yaitu *External Quality Assurance Results (EQAR)*, *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)*, *U.S. Department of Education (USDE)*, *Washington Accord*, *Sydney Accord*, *World Federation for Medical Education (WFME)*, dan lain sebagainya.

3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berbadan hukum dialihkan menjadi PTN berbadan hukum. Kemendikbud mendukung proses regulasi dan membantu PTN yang ingin menjadi PTN badan hukum. PTN seharusnya terus mengembangkan kemampuannya dengan adanya kebijakan ini.

4. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi

Kebijakan ini memberikan bimbingan dan dukungan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kredit semester (SKS) di luar prodi dan kampus. Banyak orang menyukai kebijakan ini karena memberdayakan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan keterlibatan mereka dengan mata kuliah terpilih. Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswanya menerima SKS di luar prodi di kampus yang sama selama 1 semester atau setara 20 SKS dan di luar prodi selama 2 semester atau setara 40 SKS.

Implementasi Kampus Merdeka dimulai dari revisi kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang sudah direvisi mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun ajaran baru 2020. Pada program ini, mahasiswa dapat menempuh satu semester studi pada prodi yang lain di PT yang sama atau menempuh pembelajaran pada PT lain selama satu semester dengan nilai sama, yaitu 20 SKS. Kemudian dalam dua semester berikutnya, mahasiswa bisa melakukan kegiatan di tempat kerja misalnya di sekolah selama enam bulan. Dalam enam bulan ke depan, dapat digunakan untuk kegiatan lapangan, misalnya kuliah kerja nyata yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini dapat digunakan untuk penelitian. Untuk penulisan tugas akhir berupa skripsi hingga nanti di semester 2, proyek ini diberikan nilai sebanyak 40 SKS (Prastowo et al., 2021).

Dengan demikian, disimpulkan bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebebasan mutlak mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Kebijakan ini bermula dari berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita, termasuk kurang fokusnya dosen dan mahasiswa dalam mengoptimalkan fungsi dan tugasnya yang begitu banyak sehingga mengabaikan fungsi pokoknya. Permasalahan lain termasuk juga kolonisasi pendidikan. Dalam hal ini pemerintah dan *stakeholder* memutuskan untuk meluncurkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai salah satu tanggapan yang jelas terhadap masalah pembelajaran yang begitu luas.

Kurikulum Mengacu Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PTKIN diminta mendukung pelaksanaan Kampus Merdeka. Salah satu persiapannya adalah melakukan perubahan dan penyempurnaan program. Program PTKIN saat ini mengacu pada KKNI dan SN-Dikti. Karena SN-Dikti berubah, maka kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Dokumen program mengacu pada Undang-Undang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, di dalamnya terdapat kebijakan Kampus Merdeka, khususnya hak belajar siswa selama 3 semester di luar program pendidikannya. Dokumen kurikulum baru di perguruan tinggi harus mengacu pada KKNI, SN-Dikti, dan memenuhi kebijakan Kampus Merdeka, revolusi Industri 4.0, inovasi untuk pandemi Covid-19, *outcome based education* (OBE), dan persiapan *smart campus*, *cyber campus*, kampus digital, kampus *online* dan pembelajaran *online* massal yang terorganisir, biasa dikenal dengan *Massive Open Online Courses* (MOOC) (Prastowo et al., 2021).

Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia dengan menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan perolehan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk dunia kerja (Muslihati et al., 2023). Kurikulum Kampus Merdeka secara unik berfokus pada kebutuhan mahasiswa, oleh karena itu hal ini sangat penting. Pembelajaran di kampus Merdeka memberikan tantangan dan peluang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, sikap dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam meneliti dan mencari ilmu dari fakta dan pertanyaan di lapangan seperti kebutuhan kemampuan diri, masalah yang nyata, hubungan interpersonal, kerjasama, manajemen diri, syarat kerja, tujuan dan hasil capaian (Victor Deak dkk, 2022).

Implikasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada PTKIN

Dalam kurikulum MBKM, ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yang dapat dilaksanakan dalam program studi maupun luar studi, hal ini akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut (Prastowo et al., 2021):

1. Pertukaran Mahasiswa

Saat ini, PTKIN telah melakukan beberapa pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri, meskipun jumlah transfer tersebut antar PTKIN di dalam negeri sendiri masih terbilang sedikit. Peran seorang mahasiswa adalah untuk melaksanakan sejumlah tanggung jawab, seperti menegakkan nilai-nilai tertentu seperti keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta bekerja dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Magang/Praktik Kerja

Mahasiswa tidak memiliki banyak pengalaman bekerja di bidang profesional yang sebenarnya, oleh karena itu mereka tidak langsung siap bekerja. Magang yang dilakukan dengan waktu singkat (sekitar enam bulan) sebenarnya tidak cukup untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran industri kepada mahasiswa. Menurut perusahaan penerima program magang, magang yang dilakukan dalam satu sesi dapat menjadi sia-sia bahkan merugikan kegiatan industri.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Ada banyak jenis sekolah di Indonesia beserta berbagai macam persoalan yang dihadapi, baik sekolah yang formal, nonformal, maupun informal. Di satu lembaga pendidikan tinggi, contohnya SD, SMP, atau SMA, mahasiswa melaksanakan pengajaran berbasis asistensi. Sekolah tempat praktik mengajar dapat ditemukan di kota atau daerah terpencil.

4. Penelitian/Riset

Perwujudan merdeka belajar dapat berupa kampanye penelitian di lembaga riset/pusat studi bagi mahasiswa yang kecenderungan dan keinginannya mengabdikan sebagai peneliti. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui tulisan mereka, yang

merupakan keterampilan penting untuk berbagai jenis keilmuan di pendidikan sarjana. Dengan kemampuan melihat secara jernih, seorang mahasiswa akan lebih mampu memahami dan menjalankan metode penelitian secara lebih bermanfaat. Bagi dosen perguruan tinggi yang memiliki latar belakang dan keinginan untuk berkarir di bidang riset, kesempatan untuk melakukan penelitian di laboratorium riset merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Laboratorium riset masih kekurangan SDM yang bertugas membantu penelitian selama mengerjakan proyek-proyek yang berjangka waktu pendek (1 semester-1 tahun).

5. Proyek Kemanusiaan

Indonesia sering mengalami bencana alam, antara lain gempa bumi, letusan Gunung Berapi, tsunami, badai hidrologi, dan kejadian lainnya. PTKIN telah banyak membantu masyarakat mengatasi bencana dengan menggunakan beberapa program kemanusiaan yang masih digunakan. Keterlibatan mahasiswa saat ini murni sukarela dan berjangka pendek. Selain itu, organisasi internasional lainnya, termasuk UNESCO, UNICEF, WHO, dan lainnya, telah menyelesaikan pekerjaan perencanaan dan membuat proyek percontohan untuk pembangunan baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, memiliki kecakapan intelektual, dan bermoral dapat berperan sebagai “*foot soldiers*” dalam berbagai proyek kemanusiaan baik di dalam maupun di luar Indonesia.

6. Kegiatan Wirausaha

Indonesia hanya memiliki 21% wirausahawan dunia, atau 94 dari 137 negara yang telah disurvei berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) tahun 2018. Selain itu, menurut data IDN Research Institute tahun 2019, sebesar 69,1% penduduk Indonesia memiliki minat untuk berbisnis. Namun, potensi wirausaha generasi milenial belum tergarap sepenuhnya. Diharapkan dari Kampus Merdeka mampu mengembangkan minat mahasiswa untuk menjadi wirausaha dengan dengan berbagai kegiatan yang ditawarkan.

7. Studi/Proyek Independen

Keinginan kuat untuk memajukan karir yang diakui internasional atau karya yang berasal dari berbagai ide inovatif telah banyak dimiliki oleh mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meluncurkan studi/proyek independen untuk menambah kurikulum yang telah disetujui oleh mahasiswa. PTKIN juga mampu menyelenggarakan studi mandiri untuk membahas topik-topik yang jarang tercakup dalam perkuliahan tapi tetap ada di dalam silabus. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam bentuk kerja kelompok meskipun lintas keilmuan.

8. Membangun Desa/KKN Tematik

Salah satu jenis pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk hidup rukun dengan masyarakat di luar perguruan tinggi. Melalui dialog terbuka, anggota komunitas mengidentifikasi kekuatan dan mampu mengatasi masalah, dengan harapan mampu mengembangkan potensi komunitasnya dan menemukan solusi atas masalah yang mungkin ada di sana. Dalam menyusun program pembangunan di wilayah perdesaan, inisiatif KKNT diharapkan dapat membantu mengembangkan *soft skill* kemitraan, seperti kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa. Diharapkan setelah KKNT, mahasiswa dapat membuat daftar hal-hal yang dilakukan serta hasilnya dalam format yang berbeda.

Problematika dan Tantangan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada PTKIN

Permasalahan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya, seperti substansi program ini yang mendorong penerapan praktis di lapangan menunjukkan potensi untuk mengurangi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kebijakan ini sangat terikat pada cara pemasaran untuk kebutuhan perusahaan, tidak terfokus dalam pembentukan mahasiswa yang berakhlak, menerapkan prinsip Pancasila, dan cinta tanah air. Ada kekhawatiran lain bahwa PT kedepannya tidak menghasilkan SDM yang kritis, tetapi

hanya SDM untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok Merdeka Belajar Kampus Merdeka masih agak terpecah-pecah dan tidak terpadu dan tujuan-tujuannya sudah dirantai oleh asas pokok, landasan keilmuan, kekuatan ideologis, asas dan kegunaan religi.

Dalam pelaksanaan program MBKM, diperlukan aturan atau rekomendasi dari pemimpin pada PT dan antar PT. Referensi berupa undang-undang, aturan, arahan, pedoman pelaksanaan, prosedur operasional, dan lain-lain sangat dibutuhkan untuk implementasi yang cepat. Tanpa pedoman dan tolok ukur yang jelas dari perguruan tinggi yang akan melaksanakan program ini di kampus, maka program kegiatan tidak akan efektif. Saat ini, beberapa PTKIN masih didapati belum siap dalam melaksanakan prinsip-prinsip MBKM, alasan yang terjadi adalah perlunya waktu yang cukup lama untuk mengubah pola pikir (*mindset*).

Dalam cakupan kerjasama dengan universitas lain, tentu bukanlah hal yang mudah. Institusi pendidikan tinggi tentu mempunyai syarat yang sangat tinggi untuk kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya. Universitas dengan skor kredit lebih tinggi tidak akan menerima mahasiswa dari universitas dengan skor kredit lebih rendah. Ini benar-benar tidak menguntungkan bagi siswa yang datang ke universitas yang kualifikasinya masih belum tinggi, di daerah akan banyak universitas swasta memikirkan hal ini.

Kesulitan yang dialami oleh perguruan tinggi di daerah juga disebabkan oleh sebagian besar perusahaan dan bisnis berada di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa. Masih banyak provinsi yang tidak memiliki kesiapan untuk melaksanakan MBKM. Karena kapasitas wilayah yang rendah, institusi pendidikan tinggi di daerah tersebut tidak dapat mempekerjakan mahasiswa dalam jumlah besar untuk berbisnis di sana.

Kemudian, memiliki mata kuliah dan beberapa mata kuliah yang populer di kalangan mahasiswa, baik di universitas itu sendiri maupun di universitas lain, akan menambah jumlah mahasiswa sehingga mata kuliah tersebut tidak akan berjalan efektif karena tenaga pengajar (dosen) di prodi tersebut terbatas. Kemudian penerapan praktik tersebut di instansi, lembaga atau perusahaan lain akan mengalami kesulitan dalam menentukan bobot kredit yang ditentukan di perguruan tinggi asalnya. Ada perbedaan antara kebutuhan instansi, perusahaan atau bisnis dan etika yang ditetapkan.

Pengeluaran mahasiswa akan meningkat sebagai akibat dari masalah terkait praktik tambahan dan lamanya praktik atau magang di daerah tersebut. Mahasiswa yang melaksanakan program ini akan menghabiskan lebih banyak uang. Mahasiswa akan menghabiskan banyak uang untuk praktik saat ini seperti PLP 1 dan PLP 3 dan program pengabdian masyarakat yang kreditnya tidak melebihi empat SKS dan durasinya lebih pendek dari tiga bulan, terutama jika ada banyak SKS di dalamnya. Keduanya menjadi tantangan yang sangat sulit bagi mahasiswa selama beberapa semester.

Masalah selanjutnya, transkrip nilai, lembar hasil belajar, dan hal-hal terkait lainnya tidak menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang sudah menerapkan sistem akademik daring. Namun, hal tersebut menjadi kendala bagi perguruan tinggi yang belum mengimplementasikan aplikasi siacad terintegrasi. Oleh karena itu, hanya bisa dilakukan oleh PT yang telah terpetakan dan mempunyai fasilitas yang memadai. Implementasi setiap program pembangunan SDM, termasuk persiapan tenaga pendidik (dosen) sebagai ujung tombak, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tanpa SDM penggerak (dosen), program pembangunan SDM Unggul tidak akan berjalan. Mengingat hal tersebut, maka perlu dibuat penelitian khusus untuk melahirkan dosen penggerak.

Beberapa kekhawatiran yang dialami PTKIN saat melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Mekanisme Kerjasama Prodi dengan Guru Agama Islam Luar Negeri. Dua visi Kemendikbud yang mendukung perguruan tinggi adalah kebijakan pembukaan program studi

baru serta akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Tindakan ini menciptakan suasana positif bagi mahasiswa baru yang lolos di program studi tingkat atas. Kebutuhan kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi lain (termasuk bisnis, industri, perguruan tinggi lain, dan lembaga nasional dan internasional) menciptakan tantangan dalam prosesnya.

Infrastruktur yang dimiliki oleh perguruan tinggi kecil dan terbatasnya SDM, terutama PTKIN yang berlokasi di daerah kecil. Faktor-faktor tersebut mempersulit institusi tersebut untuk bekerja sama secara efektif dengan institusi besar dan PTKIN Unggul untuk mendorong pengembangan Keilmuan dan Kemahasiswaan. Tidak ada sistem atau visi yang jelas antara Kemendikbud dengan Kementerian lain; sebaliknya, situasi saat ini hanyalah undang-undang yang menimbulkan masalah implementasi.

Kedua, Percepatan PTN *Go International* dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang akan hadir pada konferensi internasional. Badan Layanan Umum PTN (PTN BLU) dan Satker memiliki fleksibilitas keuangan, kurikulum, dan kebijakan yang kurang daripada PTN-BH; sebagai contoh, PTN harus mendapatkan akreditasi level A sebelum menjadi PTN-BH, dan sebagian besar produk PTN juga harus mendapatkan akreditasi level A sebelum menjadi PTN-BH. Dalam konteks MBKM, Nadiem menyoroti minimnya persyaratan kredit minimum, masalah persyaratan yang belum terselesaikan, dan fleksibilitas komitmen PTN-BH ketika PTN siap dan terpenuhinya persyaratan alih status.

Ketiga, Mekanisme Magang di Luar Program Studi. Tujuan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerukan kepada mahasiswa untuk memiliki kebebasan untuk menghabiskan tiga semester di luar prodi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sosial. Untuk PTN kecil atau PT yang jauh, beberapa masalah terjadi di dunia nyata dalam penerapan ini. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa di program studi dan universitas semacam ini berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, membayar magang adalah masalah yang signifikan. Magang membutuhkan setidaknya biaya perjalanan dan jenis pembayaran lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam proses pelaksanaannya memerlukan pedoman atau rekomendasi dari pimpinan PTKIN dan antar PTKIN. Referensi seperti undang-undang, peraturan, arahan, pedoman pelaksanaan, prosedur operasional, dan lain-lain sangat dibutuhkan untuk implementasi yang cepat. Tanpa instruksi yang jelas dan tolok ukur dari PTKIN yang akan melaksanakan program ini, maka kegiatan tersebut tidak akan efektif. Beberapa PTKIN masih ragu-ragu dan belum memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini, persoalan yang dihadapi adalah perubahan pola pikir yang memakan waktu cukup lama.

Problematika dan tantangan yang dihadapi oleh PTKIN dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya, yaitu tujuan pendidikan, pedoman pelaksanaan program MBKM, pola pikir, penyusunan kurikulum di prodi, kerjasama dengan PT lain, kerjasama dengan perusahaan lain, industri, pengambilan mata kuliah di prodi lain, implementasi praktik di perusahaan atau industri, dana yang diperlukan untuk praktik atau pelatihan bagi mahasiswa, sistem manajemen pendidikan, pandemi, dan kesiapan SDM. Namun secara garis besar, tantangan implementasi MBKM yaitu 1) proses kerjasama antara PTKIN dan program studi dengan pihak luar; 2) pergeseran paradigma di PTN-BH dan persaingan internasional; 3) mekanisme magang di luar prodi. Solusinya adalah menyusun panduan antar perguruan tinggi untuk penyelenggaraan program MBKM, membuat pedoman dan perjanjian dengan perguruan tinggi lain, lembaga lain, dan industri dengan memberikan sosialisasi program ini kepada dosen dan mahasiswa.

Saran

Keterbatasan penulis dalam menyediakan data berkaitan dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di PTKIN, maka disini penulis menawarkan saran bagi para peneliti yang akan datang untuk mempertimbangkan secara mendalam tentang pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, data yang diberikan memiliki tingkat yang lebih baik dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariga, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 662–670.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. (2020). *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Faisal, M., ZA, T., Siswanto, R., Hayati, & Darojat, J. (2021). The Integration of KKNI, SNPT, and the Integration-Interconnection Paradigm in Curriculum Development at PTKI. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), 309–328.
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, (Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo), 68–74.
- Hidayat, N. (2019). Urgensi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Saliha*, 02(2), 0–15.
- Hiskia U & Willius Kogoya. (2022). *Monograf: “Merdeka Belajar” (Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Jesika Dwi Putriani & Hudaidah. (2021). Penerapan Pendidikan Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 830–838.
- M Yusuf & W Afriansyah. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120–133.
- Manalu dkk. (2022). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Mahesa Research Center*, 1(1), 80–86.
- Muslihati, Sobri, A. Y., Voak, A., Fairman, B., Wonorahardjo, S., & Suryani, A. W. (2023). Engaging With Industry Through Internships in Order to Acquire the Skills, Knowledge and Attitudes for the World of Work: The Indonesian Student Experience. *Journal of*

Higher Education Theory and Practice, 23(9), 1–17.

- Prastowo, A., Suyadi, & Sutrisno. (2021). *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, D. A. (2023). *Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berparadigma Integrasi Nilai-nilai Ulul Albab (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Putra dkk. (2022). An Analysis of Madrasah Curriculum and Its Implementation in Basic Education Institutions. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 1–8.
- Sabriadi & Nurul Wakia. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175–184.
- Supriyoko, Rochmiyati, S., Irfan, M., & Ghazali, I. (2022). Online Survey: Evaluation of Indonesian Higher Education Curriculum. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 12(4), 235–240.
- Sutrisno dkk. (2022). Mengembangkan Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran di Era Merdeka Belajar. *Zahra: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 3(1), 52–60.
- Victor Deak dkk. (2022). Implementasi Pembelajaran Kampus Mandiri dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1113–1128.
- Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.